JIUBJ

Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 21(2), Juli 2021, 652-656
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi
ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print)
DOI 10.33087/jiubj.v21i2.1499

Pengaruh *Good Governance* terhadap Kinerja Karyawan di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun

Adelya Rifdah*, Bachruddin Saleh Luterlean
Prodi S1 Administrasi Bisnis, Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Universitas Telkom
*Correspondence email: adelyarifdah@telkomuniversity.ac.id, bachruddinsaleh@telkomuniversity.ac.id

Abstrak. *Good Governance* merupakan prinsip yang dapat mengobati birokrasi politik yang di nilai sering ditemukannya kasus korupsi, suap, dan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk berbagai pelanggaran hak-hak asasi manusia. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun melalui pelaksanaan E-Planning sejak tahun 2017, menunjukkan bahwa telah menjalankan *Good Governance*. Dalam hal ini seluruh pegawai Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun ikut serta dalam melaksanakan Good Governance karena menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi besarnya pengaruh *Good Governance* terhadap Kinerja Karyawan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan kausal dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan teknik Non probability sampling, dengan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh. Dimana sampel dalam penelitian ini yaitu seluruh Pegawai di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun yang berjumlah 65 responden. Hasil analisis deskriptif menunjukkan nilai yang diperoleh sebesar 77,79% sehingga *Good Governance* masuk dalam kategori baik dan kinerja karyawan masuk dalam kategori baik dengan nilai yang diperoleh sebesar 77,98%. Pengaruh antara *Good Governance* terhadap Kinerja Karyawan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun sebesar 47,3%, sedangkan sisanya sebesar 52,7% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Kata kunci: Kinerja Karyawan; *Good Governance*

Abstract. *Good governance is a principle that can treat political bureaucracy, which is considered to be frequently found in cases of corruption, bribery and abuse of power, including various violations of human rights. The Planning, Research and Development Agency of Karimun Regency through the implementation of E-Planning since 2017, shows that it has implemented Good Governance. In this case, all employees of the Karimun Regency Planning, Research and Development Agency participate in implementing good governance because they carry out government tasks. This study aims to identify the magnitude of the influence of Good Governance on Employee Performance in the Planning, Research and Development Agency of Karimun Regency. This research uses descriptive and causal research using quantitative research methods. This study uses a non-probability sampling technique, with the sample used is a saturated sample. Where the samples in this study are all employees in the Planning, Research and Development Agency of Karimun Regency, amounting to 65 respondents. The results of descriptive analysis show that the value obtained is 77.79%, so that Good Governance is in the good category and the employee's performance is in the good category with the value obtained of 77.98%. The effect of good governance on the performance of the employees of the Planning, Research and Development Agency of Karimun Regency is 47.3%, while the remaining 52.7% is the contribution of other variables not examined in this study.*

Keywords**:** *Employee Performance; Good Governance*

PENDAHULUAN

Good Governance atau tata kelola pemerintah yang baik merupakan bagian dari tatanan baru yang berkembang pasca krisis multidimensi, seiring dengan tuntutan era reformasi. Dalam konteks Indonesia yang masih bergejolak dengan tuntutan era reformasi, *Good Governance* menjadi suatu hal yang selalu diperbincangkan dan sangat terkenal saat itu. Pada setiap acara, peristiwa dan perbincangan yang berkaitan dengan masalah pemerintahan, istilah ini selalu ada di dalam perbincangan. Sebab *Good Governance* di yakini mampu mengobati birokrasi politik yang di nilai sering ditemukannya kasus korupsi, suap, dan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk berbagai pelanggaran hak-hak asasi manusia (Prianto, 2011)

BAPERLITBANG Kabupaten Karimun melalui pelaksanaan E-Planning sejak tahun 2017, menunjukkan bahwa telah menjalankan Good Governance. Dalam hal ini seluruh pegawai BAPERLITBANG Kabupaten Karimun ikut serta dalam melaksanakan *Good Governance* karena menjalankan tugas-tugas pemerintahan, yang terpenting adalah unsur dari aparatur pemerintahan itu sendiri, yaitu pegawai negeri. Pegawai sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dalam hal ini sangat jelas bahwa kedudukan dan peran pegawai negeri sangat penting. Sebagaimana yang dikemukakan dalam Undang Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan peraturan pemerintah tentang kepegawaian baru (Undang Undang Aparatur Sipil

Negara Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Dan Peraturan Pemerintah Tentang Kepegawaian Baru)

Kinerja karyawan adalah sejauh mana pegawai tersebut dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam arti kata pelaksanaan tersebut sesuai dengan rencana sehingga dapat tercapainya tujuan dan rencana dari BAPERLITBANG Kabupaten Karimun sendiri dan juga membuat kinerja yang baik. Maka pegawai dituntut untuk memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas yang mampu melaksanakan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan tugas yang dibebankan. Oleh karena itu, agar mempunyai kinerja yang baik seorang pegawai harus memiliki kemampuan yang cukup untuk memahami lingkup dan tugasnya dalam melaksanakan tugas agar dapat menghasilkan kinerja yang memuaskan dan mencapai tujuan dari instansi.

Salah satu indikator pelaksanaan *Good Governance* yaitu Pemerintah Kabupaten Karimun dalam beberapa tahun terakhir berhasil meraih penghargaan sebagai berikut:

1. Mampu mempertahankan nilai BB (Kategori Baik) terhadap Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2015-2019
2. Mampu mempertahankan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karimun hingga saat ini. (tepatnya dari thn brp nanti tante info lagi)
3. Meraih Juara Umum MTQ Tingkat Provinsi Kepulauan Riau tiga tahun berturut-turut yaitu Tahun 2018, 2019, 2020.
4. Meraih Penghargaan Swasti Saba Kategori Kabupaten Kota Sehat Tahun 2019.
5. Meraih Penghargaan sebagai Kota Layak Anak Tahun 2018.
6. Meraih Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2018.

Fenomena keberhasilan-keberhasilan diatas tentunya tidak terlepas dari peran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (BAPERLITBANG Kabupaten Karimun) mulai dari perencanaan, pengendalian sampai koordinasi pembangunan daerah Kabupaten Karimun serta dukungan dan kerja keras seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Karimun. Keberhasilan atau kegagalan misi instansi pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetepkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik didapat dari Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP). Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) pada semua tingkat dan lini pemerintahan pada semua kegiatan merupakan strategi sasaran yang ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Karimun Tahun 2017, 2018, dan 2019. Diambil data dari 3 tahun terakhir agar dapat dijadikan bahan pembanding. Adapun evaluasi pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Grafik Indeks Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Karimun

Sumber: Perjanjian Kinerja Kabupaten Karimun Tahun 2017, 2018, dan 2019 (Data olahan penulis)

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengambil judul *"Pengaruh Good Governance* Terhadap Kinerja Karyawan Di Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Karimun*."*

Menurut LAN & BPKP (2000) yaitu: Penyelenggara pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantaranya domain-domain negara, sektor wisata dan masyarakat. Inti dari good governance menurut Mardiasmo (2018), good governance dapat diartikan sebagai cara mengelola semua urusan-urusan publik dengan baik.

Menurut Sedarmayanti (2012) menyatakan bahwa ada empat prinsip utama dalam pelaksanaan Good Governance, yaitu:

1. Akuntabilitas (pertanggung jawaban), yaitu adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggun jawab atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.
2. Transparansi (keterbukaan), karena pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun daerah.
3. Partisipasi (melibatkan masyarakat terutama aspirasinya), yaitu menghendaki keterbukaannya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap serta pemerintah yang dinilainya tidak baik. Pemerintahan yang baik juga menyediakan sarana publik untuk menampung aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan tugas pemerintahan.
4. Penerapan hukum (aturan hukum), pemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.

Definisi Kinerja karyawan yang dikemukakan oleh Gomes dalam Mangkunegara (2005) adalah: "Ungkapan *output*, efisiensi serta efektivitas sering

dihubungkan dengan produktivitas". Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kinerja sumber daya manusia adalah kinerja atau hasil kerja yang diperoleh secara kualitatif dan kuantitatif atau hasil kerja yang dicapai oleh sumber daya manusia di perusahaan pada saat perusahaan melaksanakan tugas pekerjaannya sesuai dengan tanggung jawab yang ditetapkan.

Indikator kinerja merupakan suatu ukuran kualitas dan kuantitas yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Michel dan Larson dalam Sedarmayanti (2009), indikator kinerja sebagai berikut:

1. Kemampuan
   Kapasitas individu untuk melaksanakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan adalah salah satu hal yang harus dimiliki dalam jenjang apapun karena kemampuan memiliki kepentingan yang sangat penting.
2. Inisiatif
   Mempunyai kesadaran diri untuk melakukan sesuatu dalam melaksanakan tugastugas dan tanggung jawab. Bawahan atau pegawai dapat melaksanakan tugas tanpa harus bergabung terus menerus kepada atasan.
3. Ketepatan waktu
   Sesuatu yang berkaitan dengan sesuai atau tidaknya waktu penyelesaian pekerjaan dengan target waktu yang direncanakan. Setiap pekerjaan diusahakan untuk selesai sesuai dengan rencana agar tidak mengganggu pada pekerjaan yang lainnya.
4. Kualitas hasil kerja
   Kualitas kerja lebih menekankan pada hasil atau yang diperoleh dari sebuah pekerjaan sebagai kontribusi pada perusahaan atau organisasi.
5. Komunikasi
   Interaksi yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan maupun sebaliknya untuk mengemukakan saran dan pendapatnya dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Komunikasi dapat menimbulkan kerjasama yang lebih baik dan akan terjadi hubungan yang semakin harmonis diantara para pegawai dan para atasan.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan kausal dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan teknik Non probability sampling, dengan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh. Dimana sampel dalam penelitian ini yaitu seluruh Pegawai di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun yang berjumlah 65 responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif

Variabel	Nilai	Keterangan
Good Governance (X)	77,79%	Baik
Kinerja Karyawan (Y)	77,98%	Baik

Sumber : Hasil Olahan Data, 2021

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian analisis deskriptif mengenai variabel X yaitu *Good Governance*, tanggapan responden mengenai variabel ini yaitu sebesar 77,79% dan berada pada kategori baik yang artinya responden menyatakan bahwa penerapan prinsip *Good Governance* pada BAPERLITBANG Kabupaten Karimun sudah terlaksana dengan baik dan berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian analisis deskriptif mengenai variabel Y yaitu Kinerja Karyawan , tanggapan responden mengenai variabel ini yaitu sebesar 77,98% dan berada pada kategori baik yang artinya responden menyatakan bahwa Kinerja Karyawan pada BAPERLITBANG Kabupaten Karimun sudah berjalan dengan baik.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak. Hasil uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2. Hasil Uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		65
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.30908558
Most Extreme Differences	Absolute	.124
	Positive	.124
	Negative	-.071
Test Statistic		.124
Asymp. Sig. (2-tailed)		.015[c]

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2021

Berdasarkan tabel 2 diatas, angka signifikan uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* yaitu 0,015 yang berarti 0,015 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.687[a]	.473	.464	3.96445	1.375

a. Predictors: (Constant), X
b. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2021

Dalam tabel diatas dapat dilihat bahwa variable memiliki nilai DW 1.375, maka tidak terjadi autokorelasi dikarenakan nilai DW 1.375 yang berada diantara -2 dan +3 atau -2 < DW < +2.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada gambar 2 berikut:

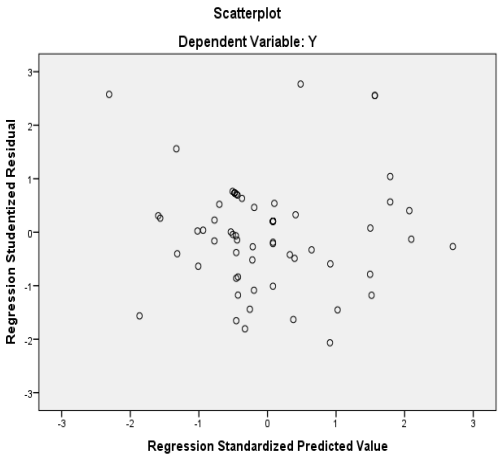

Gambar 2. Hasil Uji Heterokedastisitas
Sumber : Hasil Olahan Data, 2021

Berdasarkan gambar diatas, terlihat titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah atau disekitar angka 0. hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak untuk digunakan dalam melakukan pengujian.

Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menyatakan hubungan kausalitas antara dua variabel dan untuk memperkirakan nilai variabel terikat berdasarkan nilai variabel bebas. Dari hasil pengolahan data, diperoleh persamaan regresi yaitu:

Y = 6.409 + 0,678X

Untuk dapat mengetahui hubungan antara dua variabel dalam penelitian ini maka digunakan perhitungan SPSS:

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.409	4.500		1.424	.159
	X	.678	.090	.687	7.513	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Hasil Olahan Data, 2021

Konstanta sebesar 6.049 berarti bahwa nilai konsisten variabel *Good Governance* sebesar 6.049 dan koefisien regresi X sebesar 0,678 yang menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai X yaitu *Good Governance*, maka nilai Y yaitu Kinerja Karyawan bertambah sebesar 0,678. Koefisien regresi tersebut bernilai positif sehingga dapat dinyatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif.

Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Gambar 5. Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.409	4.500		1.424	.159
	Good Governance	.678	.090	.687	7.513	.000

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa variable X yaitu Good Governance memiliki nilai thitung > ttabel karena nilai thitung sebesar 7,513 tidak berada diantara 1,998. Maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh secara signifikan dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,1. Maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan dari variable X yaitu Good Governance terhadap variable Y yaitu Kinerja Karyawan.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.687[a]	.473	.464	3.96445

a. Predictors: (Constant), Good Governance

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS, 2021

Adapun perhitungan menggunakan rumus koefisien determinasi sebagai berikut:

KD = r^2 x 100%

KP = $0{,}687^2$ x 100%

= 47,3%

Berdasarkan rumus koefisien determinasi r^2 sebesar $0{,}687^2$ dikali 100% dan didapatkan hasil nilai koefisien determinasinya sebesar 47,2% sehingga dapat dilihat pada tabel 4.14 yang menunjukkan bahwa nilai R square sebesar 0,473 yang berarti hubungan antar variabel X yaitu *Good Governance* dan variabel Y yaitu Kinerja karyawan sebesar 0,473 atau 47,3%. Sedangkan sisanya sebesar 52,7% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan *Good Governance* (X) pada BAPERLITBANG Kabupaten Karimun masuk ke dalam kategori baik, terdapat dimensi transparansi

yang masuk ke dalam kategori baik tetapi mendapat nilai yang terendah sehingga perlu diperhatikan dan diperbaiki lagi.

2. Penerapan Kinerja Karyawan (Y) pada BAPERLITBANG Kabupaten Karimun masuk ke dalam kategori baik, terdapat dimensi inisiatif yang masuk ke dalam kategori baik tetapi mendapat nilai yang terendah sehingga perlu diperhatikan dan diperbaiki lagi.
3. Terdapat pengaruh penerapan *Good Governance* terhadap Kinerja Karyawan.

DAFTAR PUSTAKA

LAN & BPKP, 2000. Akuntabilitas dan Good Governance. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Mangkunegara, Anwar Prabu, 2005. Evaluasi Kinerja SDM, Bandung, Refika Aditama.

Mardiasmo, 2018. Akutansi Sektor Publik. Yogyakarta.

Prianto, 2011. Good Governance dan Formasi Kebijakan Publik Neo-Liberal. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan.

Sedarmayanti, 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi, dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Refika Aditama, Bandung.

Sedarmayanti, 2012. Good Governance Kepemerintahan Yang baik Bagian Pertama edisi revisi, Mandar Maju, Bandung

Undang Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Dan Peraturan Pemerintah Tentang Kepegawaian Baru